

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur/ Buku

- Atmasasmita. Romli,. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Arief. Barda Nawawi,. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali. Zainudin,. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie. Jimly,. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ardi. Muhammad,. 2001. Peranan Badan Pengawas Daerah Dalam Penyelesaian Kerugian Daerah Di Propinsi Lampung. *Tesis*, Bandar Lampung: Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.
- Donal. Fariz,. 2013. *Proyek Ambisius Pembentukan Pengadilan Tipikor dalam Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Danil. Elwi,. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Effendy. Marwan,. 2005. *Kejaksaan R.I., Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan. 1994. *Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Dan Stabilitas Politik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim,. dan Nurbaini. Erlies Septiana,. 2016. *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- HR. Ridwan,. 2006. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- HS. Sali,. dan Nurbaini. Erlies Septiana,. 2016. *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Hadjon. Philipus M,. 1998. *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Adminitrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Hartanti. Evi., 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah. Andi., 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Howard Zehr and Ali Gohar. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Intercourse: Good Books.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang PeradilanTata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jaya. Nyoman Serikat Putra., 2008. *Beberapa Pemikiran ke ArahPengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusumohamidjojo. Budiono., 2011. *Filsafat Hukum: ProblematikKetertiban yang Adil*. Bandung:CV Mandar Maju.
- Kartono. Kartini., 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kahmad. Dadang., 2000. *Metode Penelitian Agama*.Bandung: CV. Pustaka Setia,
- M.W. Kusumah., 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi. Lilik., 2000. *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penunutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurdjana. IGM., 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Narbuko, Cholid, dan Achmadi. Abu., 2001. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Patitingi, Farida, dan Jurdi. Fajlurrahman., 2016. *Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum diatas Hegemoni Oligarki*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

- Razi. Fachrudin,. 2014. *Pemberian Remisi terhadap Terpidana Korupsi dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Group.
- Rahadrjo Satjipto,. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahadrjo. Satjipto,. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhiti. Hyronimus,. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rahadrjo. Satjipto,. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ravena & Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rifai. Ahmad,. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso. M. Agus,. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Syafrudin. Ateng,. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Tanggung Jawab*. Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto. Heni,. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister.
- Siahaan. R. Onggala,. 2014. *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*. Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI.
- Tio Rae. Gradios Nyoman,. 2020. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada.

Umbara. Redaksi Citra,. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*. Bandung: Citra Umbara.

Watch. Indonesia Corruption,. 2021. *Tren Vonis Korupsi 2020: Koruptor Merajalela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera*. Jakarta: ICW.

Wiyono. R,. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Winarno. Nur Basuki,. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Yanuar. 2015. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT Alumni.

2. Jurnal/ Artikel/ Karya Ilmiah

Erlangga. Harum,. 2021. Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Remisi terhadap Narapidana Kasus Korupsi. *Jurnal Magistra Law Review*, Volume 02, Nomor 2, Juli 2021, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Karunia. Ana Aniza,. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedmann. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1, 2022, Universitas Sebelas Maret.

Latifah. Marfuatul,. 2012. Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Negara Hukum*, Vol, 3, No. 1, Juni 2012.

Murdiawati. Dena,. 2021. Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 23, No. 1, Juni 2021, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Moho. Hasaziduhu,. 2019. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, kemanfaatan dan Keadilan. *Jurnal Imiah Warta Darmawangsa*, Vol. 13, No. 1 Januari 2019, Universitas Darmawangsa.

Muchlis. Ahmad,. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan. *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 Issue 2, April-June 2016.

Natalia. Lintang Tesalonika,. 2013. Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, April-Juni 2013.

Nalle. Victor Imanuel W,. 2009. Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009. *Jurnal Yudisial*, Vol 6.

Rahmanto. Tony Yuri,. 2019. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, 01 Maret 2019, Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

Simartamata. Berlian,. 2011. Pemberian Remisi terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3.

Syamsudin. 2012. Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. (1).

3. Internet

Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. 2021. Aparat Penegak Hukum. <https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/aparat-penegak-hukum/>., diakses Rabu, 26 Juli 2023, Pukul 09.00 WIB.

Kejaksaan RI. 2023. Pengertian Kejaksaan. <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>., diakses Rabu, 26 Juli 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wikipedia. 2023. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia , diakses Rabu, 26 Juli 2023, Pukul 09.00 WIB.

Mahkamah Agung. 2023. Tugas dan Fungsi MA. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>., diakses Rabu, 26 Juli 2023, Pukul 09.00 WIB.

4. Undang-Undang

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapa Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

